

SKRIPSI

**KEKUATAN IDENTITAS PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

**DISUSUN OLEH:
ASRUNIL B.
E111 15 005**

**PRODI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEKUATAN IDENTITAS PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

Di susun oleh :

ASRUNIL B.


E 111 15 005

Telah diujikan dan dinyatakan memenuhi syarat

Pada tanggal : 15 Februari 2021

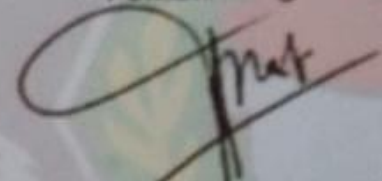
Menyetujui :

Pembimbing I


Prof. Dr. Muhammad, M.Si

NIP. 197109171997031001


Pembimbing II


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

NIP. 197308131998022001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD

NIP. 196212311990031023

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**KEKUATAN IDENTITAS PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**

Di susun oleh :

ASRUNIL B.

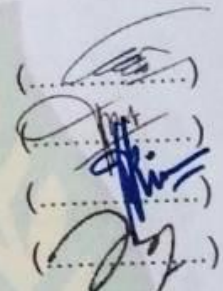
E 111 15 005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, M.Si
Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
Anggota : Dr. Ariana, S.IP., M.Si
Anggota : Ummi Suci Fathia. B, S.IP., M.IP



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Asrunil B
Nim : E11115005
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang pendidikan : Strata-1(S1)

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "KEKUATAN IDENTITAS PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG" adalah Merupakan Karya Hasil Sendiri, Bukan Merupakan Pengambilan Tulisan Atau Pemikiran Orang Lain.

Apabila Di Kemudian Hari Terbukti Atau Dapat Dibuktikan Bahwa Sebagian Atau Keseluruhan Isi Skripsi Ini Hasil Karya Orang Lain Atau Melakukan Kutipan Tanpa Mencantumkan Sumbernya, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Atas Perbuatan Tersebut.

Makassar , 3 maret 2021



ABSTRAK

ASRUNIL B, E11115005. Skripsi Yang Berjudul “Kekuatan Identitas Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” yang Disusun Di Bawah Bimbingan Bapak Muhammad Selaku Pembimbing I Dan Ibu Gustiana A. Kambo Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud keterpilihan perempuan dalam pemilihan Kepala Desa Watu Toa dan Desa Bara'e di Kecamatan Marioriwawo tahun 2018. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan identitas perempuan pada pemilihan kepala desa Watu Toa dan Bara'e di Kecamatan Marioriwawo di Kabupaten Soppeng.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis yakni konsep identitas dan konsep kekuatan politik. Penulis menggunakan konsep identitas politik untuk menempatkan identitas perempuan. Sementara konsep kekuatan politik digunakan untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh kepala desa terpilih. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Watu Toa dan Desa Bara'e di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan Kepala Desa perempuan pada pemilihan Kepala Desa Watu Toa dan Desa Bara'e di Kecamatan Marioriwawo menunjukkan adanya kekuatan identitas perempuan yang digunakan oleh kandidat dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Hal ini ditunjukkan melalui pencitraan diri sebagai perempuan dan kapabilitas ditonjolkan pada kedua Kepala Desa perempuan tersebut, namun dalam hal ini kekuatan identitas perempuan tersebut tak dapat serta merta digunakan sebagai modal keterpilihan tanpa adanya kekuatan pendukung seperti latar belakang keluarga, kekuatan ekonomi, serta popularitas jabatan sebagai incumbent.

Kata Kunci : *Perempuan, Kekuatan politik, Kepala Desa, Pilkades*

ABSTRACT

ASRUNIL B, E11115005. The thesis entitled " The Strength of Women's Identity in the Selection of Village Chiefs in Marioriwawo Subdistrict soppeng regency " which was prepared under the guidance of Mr. Muhammad As Supervisor I and Mrs. Gustiana A. Kambo as Supervisor II.

This study aims to find out how women's choice exists in the election of Watu Toa Village Head and Bara'e Village in Marioriwawo District in 2018. The problem formulation in this study is how the strength of women's identity in the selection of watu toa and bara'e village heads in Marioriwawo subdistrict in Soppengs Regency

In this research the approach used in conducting analysis is the concept of identity and the concept of political power. The author uses the concept of identity politics to place the identity of women. While the concept of political power is used to look at the resources owned by elected village chiefs. The research method used is qualitative research design with descriptive research type. Data collection is done by way of in-depth interviews. The research locations were conducted in Watu Toa Village and Bara'e Village in Marioriwawo District, Soppeng Regency.

The results showed that the selection of female village chiefs in the election of Watu Toa village head and Bara'e village in Marioriwawo subdistrict showed the strength of women's identity used by candidates in influencing voter behavior. This is demonstrated through self-image as a woman and the capability is highlighted in both village chiefs, but in this case the strength of the woman's identity can not necessarily be used as the capital of choice without the supporting power such as family background, economic strength, and popularity of position as incumbent.

Keywords: *Women, Political Power, Village Head, Pilkades*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Kekuatan Identitas Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Baharu dan Hasnawati Saudaraku Sunarti dan keluarga Sirajuddin, Yana Nurul Fitri, Fikri Haekal, dan Adelia Pertiwi adalah bagian terpenting dalam seluruh episode perjalanan hidup penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis bagi keluarga besar Ambo Sakka dan Gama. Segenap ucapan terima kasih penulis yang telah senantiasa memberi curahan kasih sayang, doa, nasehat hingga akhir hayatnya sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan oleh banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si selaku pembimbing 1 dan ibu Dr. Gustiana A. Kambo S.IP.M.SI selaku Pembimbing II dan juga penasehat akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Drs. H.A. Yakub, M.Si. P.hD. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Andi Ali Armunanto S,IP M,Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, (Alm.) Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, (Alm.) Dr. Basyir Syam, Dr Ariana yunus, M.Si, Dr. Muhammad Saad, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP,M.Si, Haryanto, S.IP. MA, dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
7. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik Ibu Hasna, dan Pak Aditya Firmansyah dan Pak Hamzah yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
8. Kepada Sahabat Rifan S.IP, Wahyudin, Ayu, Rahmat S.IP, Liza S.IP, Galank S.IP, Fichri S.IP, Ningrat S.IP, Dika S.IP, Ime S.IP, Syarif S.IP, Dianto S.IP, Jhony, Marwah S.IP, Ubay S.IP, Tias

S.IP,lin, Siska, nita, aswita S.IP, Upi, Susi S.IP yang selalu memberi semangat dan juga mengirimkan doa.

9. Saudara-saudara Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa S.IP , Ayu, Rahmat besar S.IP, Liza S.IP, Nisa S.IP, Galank S.IP, Pira, Astmha S.IP, Fichri S.IP, Poces S.IP, Ningrat S.IP, Lembang, Dika S.IP, Dery, Evita, Syawal, Ime S.IP, Ramma Kecil S.IP, Syarif S.IP, Dianto S.IP, Jhony, Vivi S.IP, Marwah S.IP, Ubay S.IP, Tias S.IP, Nindy S.IP, Adi S.IP, Dilla S.IP, Kamal S.IP, Ical, Juned S.IP, Sibga S.IP, Mira S.IP, Arigie, Ifan, ekky,Upi, Susi S.IP,cika, lin.Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

10.Terima kasih kepada editor penulis yang selalu membantu dalam perjalanan penulisan skripsi ini Andi Marwah Hermansyah, S.IP, Nurhaliza S.IP, Ona Mariani S.IP, Akbar Najemuddin S.IP.

11.Terima kasih kepada Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa dan para senior-junior di Himapol yang senantiasa membantu dan mendukung penulis terkhusus kepada Angkatan Demokratis 08, Interaksi 09, Genealogi 10, Itegritas 11,Restorasi 12, Konsolidasi 13,Amandemen 14, Reformasi 16, Dekrit 17, Revolusi 18, Diplomasi 19.

12.Terima kasih kepada Kema Fisip Unhas terkhusus kepada MOGM 2015.

13. Lisan Cab. Makassar yang telah menjadi tempat belajar penulis selama ini.

14. Kepada teman-teman KKN REGULER BARRU 99, DESA Balusu Kecamatan Balusu .Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan dan waktu selama KKN dan telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian.

15. Terima kasih kepada teman-teman SMAN 5 Soppeng khususnya kelas IS Excellent dan juga keluarga Warkop Ples 62 dan Kopi Ide.

16. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para masyarakat Desa Watu Toa dan Desa Bara'e serta informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis

Penulis berharap skripsi ini di terima dengan baik serta bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan masukan ke dalam dunia pendidikan.

Makassar, 02 Februari 2021

Penulis,



Asrunil B.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Telaah Pustaka.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Identitas	10
2.2 Konsep Kekuatan Politik.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Skema Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Dasar dan Tipe Penelitian	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data	31

3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng	39
4.2 Keadaan Geografi Kabupaten Soppeng.....	42
4.3 Gambaran Umum Desa Watu Toa.....	44
4.4 Gambaran Umum Desa Barae.....	47
4.5 Kondisi Umum Pilkades Desa Watu Toa dan Desa Barae.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa	54
5.1.1 Kekuatan Identitas Perempuan Pada Pilkades 2018.....	54
5.1.2 Kekuatan Politik Pendukung Perempuan Pada Pilkades 2018	
.....	62
BAB VI PENUTUP.....	76
6.1.1 Kesimpulan.....	76
6.1.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
Lampiran.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi biasa di hadapkan pada pemerintahan yang semua warga negara memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Sistem Negara demokrasi menjadikan semua warga negara bebas berpendapat dan bersuara untuk kepentingan bersama. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.¹ Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi demi kemajuan bangsa.

Kesetaraan dalam Undang-Undang membuka ruang baru terhadap eksistensi peran perempuan di Indonesia. Mereka bisa keluar dari ruang domestik dan bisa masuk dalam ranah publik yang dulu hanya dikerjakan oleh laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Indonesia seutuhnya.²

¹ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 3

² Kelompok Kerja *Convention Watch Hakasasi perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012) hlm 1.

Gambaran mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan di ranah publik di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan politik masih terjadi ketimpangan. Laki-laki masih mendominasi baik di tataran lokal maupun nasional. Perempuan masih dicitrakan dengan urusan domestik seperti mengurus rumah tangga, suami dan anak. Hal itu dibuktikan dengan pemilu dari tahun ke tahun masih di dominasi kaum laki-laki.

Laki-laki dipercaya mampu memegang kontrol dalam segala aspek kehidupan sehingga perempuan menjadi kelompok yang dinilai memiliki pengaruh paling sedikit. Hal ini menyebabkan hak-hak publik perempuan, baik di ranah domestik, budaya, politik, dan lain-lain menjadi sangat terbatas. Pembatasan yang diberikan kepada kelompok perempuan menimbulkan pendiskriminasian dan menyebabkan terbelenggunya kelompok perempuan dalam menjalankan perannya sebagai perempuan.

Patriarki menjadi budaya yang paten dalam kelompok masyarakat dimana patriarki diartikan sebagai kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut menempatkan laki-laki menduduki peran yang paling penting dalam menjalankan fungsi di segala aspek kehidupan sedangkan perempuan menempati posisi nomor dua.

Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Meskipun secara aturan telah mulai membuka ruang bagi partisipasi perempuan namun yang masih menjadi persoalan adalah kesiapan perempuan untuk terlibat dalam ruang politik.

Selain itu aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.³ Hal tersebut merupakan rakayasa kebudayaan dan tradisi yang menciptakan pelabelan tertentu pada perempuan yang sudah mengakar di masyarakat khususnya di kabupaten Soppeng. Hal itu pun bisa di lihat dari historis kepemimpinan di Soppeng yang selalu di pimpin oleh laki-laki dan keterunan bangsawan

Peran perempuan beberapa tahun terakhir dalam pembangunan telah mengalami pembaharuan khususnya dalam bidang politik. Fakta tentang partisipasi perempuan di Indonesia sudah ada yang setara dengan laki-laki. Posisi penting baik di pemerintahan maupun non pemerintahan sudah banyak dijalankan oleh perempuan. Selain itu keikutsertaan perempuan memberikan warna dalam dalam proses politik yang sedang berjalan.

Kebijakan kuota 30% merupakan awal keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk penghapusan deskriminasi pada partisipasi di ruang public antara laki-laki dan perempuan. Sehingga bisa mendorong adanya kesetaraan kepada perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya.

³Irma, Ade &Hasanah, Dessy. MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. Vol. 07. No. 1. Social Work Journal.

Perempuan dalam ranah privat maupun publik mengalami perubahan mendasar terhadap perempuan yang tidak lagi menempatkan kaum laki-laki untuk mendominasi pembagian kerja dan peran. Hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk memberikan sumbangsih secara langsung dalam ruang politik yang akhirnya memunculkan calon-calon perempuan dalam pemilihan umum. Salah satu contohnya perempuan menjadi kepala desa beberapa daerah di Indonesia. Ini membuktikan perempuan telah berhasil mejadi pemimpin melalui pemilihan umum.

Partispasi perempuan di dunia politik menduduki ranah yang beragam, salah satunya menjadi kepala desa. Hal tersebut bisa dilihat pada kecamatan Marioriwawo di Kabupaten Soppeng. Kecamatan tersebut mempunyai 11 desa. Dua desa di antaranya dipimpin oleh perempuan, yaitu desa Bara E dan Desa Watu Toa. Keduanya terpilih melalui pemilihan langsung.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng secara serentak dalam dua gelombang, yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam pemilihan kepala desa serentak tersebut terdapat dua calon kepala desa perempuan yang memperoleh suara terbanyak dalam penghitungan suara. Dua desa tersebut adalah Desa Bara'e dan Desa Watu Toa. Di desa Bara'e kepala desa terpilih bernama Hj. Martang dan pada desa Watu Toa kepala desa terpilih bernama Hj.A. Nirma.

Keterpilihan dua kepala desa perempuan tersebut membuktikan bahwa adanya kekuatan identitas yang mereka gunakan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Menariknya lagi dua calon perempuan tersebut sama-sama merupakan calon petahana. Hal ini membuktikan bahwa dua calon perempuan tersebut mampu menjaga dukungan dari masyarakat.

Sosok calon kepala desa di desa Watu Toa yang bernama Hj.A.Nirma merupakan calon petahana di kenal memiliki sifat kelembutan dan keramahannya sehingga mampu mengolah masyarakat lebih dekat dengannya. Sosok keibuannya yang mengayomi menjadi daya tarik bagi masyarakat. Beliau juga di kenal terbuka kepada masyarakat dan professional.

Dalam pilkades Desa Watu Toa terdapat tiga kandidat yang saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemenangan Hj.A.Nirma dalam pilkades di Desa Watu Toa menunjukkan adanya kekuatan politik yang digunakan sehingga unggul dibanding kandidat lain. Beliau bisa menang dalam pemilihan kepala desa melawan dua kandidat laki-laki lainnya yang bernama Heryanto, SE dan Abd. Hafid.

Pada masa pemilihan kepala desa Watu Toa, Hj.A.Nirma terpilih sebagai kepala desa. Perolehan suara yang diperoleh Hj.A.Nirma adalah sekitar 1679 suara dari 2045 pemilih. Hal tersebut menunjukkan Lebih setengah dari jumlah pemilih yang ada memilih Hj.A.Nirma pada pemilihan

tersebut, sisa dari jumlah suara pada pemilihan itu yang berjumlah 366 suara yang hanya memilih dua kandidat lainnya.

Sosok perempuan selanjutnya yang bernama Hj. Martang yang juga merupakan kepala desa terpilih pada desa Bara'e. Ini merupakan masa jabatan beliau yang kedua kalinya di desa Bara'e. Ini memberikan gambaran bahwa adanya kekuatan identitas. Beliau di kenal mempunyai sikap fleksibilitas dan ramah ketika berhadapan dengan masyarakat terlebih mudahnya masuk dalam pergaulan perempuan.

Dalam pemilihan kepala desa Bara'e itu diikuti oleh dua kandidat saja. Hj. Martang sebagai sosok perempuan mampu memenangkan pertarungan melawan penantanginya yang bernama Muhammad Saleh, S. Sos. untuk menjadi kepala desa. Perolehan suara yang diperoleh Hj. Martang adalah berjumlah 730 suara dari 1307 pemilih. Lebih setengah dari jumlah pemilih yang ada memilih Hj. Martang, sedangkan kandidat lain yakni Muhammad Saleh, S. Sos memperoleh suara 577.

Selain menonjolkan kekuatan identitas perempuan yang dimiliki keduanya juga mempunyai kekuatan politik yang lain. Misalkan saja modal nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keislaman juga mejadi faktor keterpilihan untuk menjadi seorang pemimpin di kedua desa ini. Hj.A.Nirma dan juga Hj.Martang sama-sama mempunyai prestise "Hj" yang merupakan symbol keislaman mereka.

Kedua sosok perempuan ini juga didukung oleh kekuatan jaringan keluarga. Itu bisa di lihat dari keluarga Hj.A.Nirma yang suaminya yang

bernama A. Akbar Singke merupakan pengusaha tambang terbesar di Kabupaten Soppeng dan juga mantan anggota dewan provinsi Sulawesi selatan dapil 8 periode 2014-2019. Sedangkan keluarga Hj.Martang di mana suaminya yang bernama Amiruddin merupakan mantan kepala desa dua periode di desa Bara'e dan juga merupakan calon anggota dewan daerah kabupaten Soppeng dapil 5.

Sebagai pemimpin yang berlatar belakang perempuan, keterpilihan mereka merupakan sesuatu yang menarik di tengah budaya patriarki yang mengakar di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Soppeng.. Fenomena ini merupakan wujud keterlibatan perempuan di ranah politik. Mereka juga merupakan kepala desa perempuan pertama di desanya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis melihat adanya hal menarik dalam fenomena tersebut sehingga tertarik untuk mengkaji tentang **“KEKUATAN IDENTITAS PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersusun, peneliti merangkum rumusan, yakni bagaimana kekuatan identitas perempuan pada pemilihan kepala desa Watu Toa dan Bara'e di Kecamatan Marioriwawo di Kabupaten Soppeng.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan kepala desa perempuan pada pemilihan kepala desa Watu Toa dan Bara'e di Kecamatan Marioriwawo di Kabupaten Soppeng.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritik**, menunjukkan secara ilmiah mengenai kekuatan identitas perempuan pada pemilihan kepala desa. Selain itu, dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan mengenai ilmu politik.
2. **Manfaat Praktis**, memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami kekuatan perempuan dalam keterpilihan kepala desa perempuan yang ada di Kabupaten Soppeng. Serta, sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

1.5. Telaah pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang identitas perempuan

terutama yang berhubungan dengan keterpilihan kepala desa perempuan. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Ryanda Adlis dengan judul skripsi analisis keterpilihan misna walia setri sebagai kepala desa pulau tengah siberakun kecamatan benai. Di dalam penelitian ini menjelaskan mengenai keterpilihan perempuan untuk pertama kalinya mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dengan isu gender dan modal-madal lainnya.

Penelitian ke dua di lakukan oleh Andi Agustiara Marti dengan judul skripsi kekuatan politik perempuan dalam pemilihan kepala desa. Dalam penemuan penelitiannya, penulis menemukan bahwa faktor pendorong kekuatan politik perempuan adalah harus menggunakan modal social dan politik.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan. Penulis pada .penelitian ini mencoba mengkombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya digunakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan dengan topik, judul, dan fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan studi dan kajian. Konsep-konsep yang dibahas adalah konsep teori identitas, konsep kekuatan politik. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Teori Identitas

Identitas berasal dari bahasa Inggris, yakni "*Identity*" yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda dan jati diri. Ciri-ciri ini dapat berupa ciri-ciri fisik maupun non fisik. Sebagai jati diri identitas memiliki dua pengertian, Pertama merujuk pada sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Kedua merupakan surat keterangan atau riwayat hidup seseorang. Identitas dapat melalui dua sumber yakni aturan-aturan social yang menjelaskan definisi dari tingkah laku tertentu dan sejarah hidup seseorang. Identitas dapat diketahui dengan cara melakukan interaksi dengan orang lain.

Konsep 'identitas' dibatasi sebagai "*A sense of self that develops as the child differentiates from parents and family and takes place in society*". Konsep ini mengacu pada pengertian dan citra yang dimiliki orang mengenai siapa diri mereka, pada apa yang paling penting mengenai mereka. Sumber-sumber identitas yang penting rupanya mencakup

nasionalitas, etnisitas, seksualitas (homoseksual, heteroseksual, biseksual), gender dan kelas. Meskipun individu adalah yang memiliki identitas, konsep ini berkaitan juga dengan kelompok sosial tempat individu menjadi bagiannya dan menjadi dasar rujukan identifikasinya.⁴

Identitas dapat diketahui dengan cara melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi ini menjadi jalan bagi seseorang untuk mendapatkan pengakuan atas identitasnya dan penentu diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu golongan. Hank Johnston Enrique Larana dan Joseph R. Gusfield menyatakan bahwa identitas terbagi menjadi identitas individu dan kolektif⁵

1. Identitas individu

Individu merupakan makhluk yang independen terhadap dirinya. Identitas ini berkaitan dengan siapa dan diakui sebagai apa seseorang dalam masyarakat terlepas dari ketergantungannya dengan orang lain. Ketika bergabung dengan komunitas sosial, seseorang bisa memiliki satu bahkan lebih identitas individu. Identitas ini diperoleh sejak lahir dan melalui interaksi dengan sesamanya seperti identitasnya sebagai perempuan.

2. Identitas Kolektif

Identitas ini muncul akibat adanya interaksi yang terjadi antar individu di dalamnya. Identitas kolektif dimulai dari kesungguhan individu dalam menjalin kerjasama dan membangun kedekatan antar

⁴ Rahamnia.2012.Budaya dan Identitas.Sidoarjo:DwiPutra Pustaka Jaya.hal 5.

⁵ Fikri Adrian.2013.Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (studi pemilihan gubernur DKI Jakarta Tahun 2012).hal.23-24

sesame. Hal itu bisa dilihat dari identitas seseorang berdasarkan, suku, etnis, budaya dan sebagainya.

Sementara identitas individu yang di maksud adalah bagaimana melihat karakter individu yang tercermin sejak lahir sebagai suatu anugerah dari sang pencipta. Hal ini merupakan identitas dasar dan kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Terkait dengan pemikiran tersebut, Jary mengasumsikan bahwa identitas adalah jati diri yang terkait dengan perasaan diri, yaitu rasa diri yang berkembang selama masa pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, yang dapat membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan berarti baginya serta apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya⁶.

Erikson juga menjelaskan bahwa identitas diri merupakan sebuah kondisi psikologis secara keseluruhan yang membuat individu menerima dirinya, memiliki orientasi dan tujuan dalam mengarahkan hidup serta keyakinan internal dalam mempertimbangkan beberapa hal. Kemudian Erikson menyebutkan istilah pencarian identitas diri sebagai sebuah upaya untuk meneguhkan suatu konsep diri yang bermakna, merangkum semua pengalaman berharga di masa lalu, realitas keyakinan yang terjadi termasuk juga aktivitas yang dilakukan sekarang serta harapan di masa

⁶ Gustiana A. Kambo. 2017. Penguatan idntitas perempuan dalam pemilihan kepala daerah.the politics (jurnal magister universitas hasanuddin. Vol 3 no. 1 hal.5-6

yang akan datang menjadi sebuah kesatuan gambaran tentang 'diri' yang utuh, berkesinambungan dan unik⁷

Menurut Erikson bila seseorang yang sedang membentuk identitasnya akan berusaha menjadikannya diri sendiri sebagai "AKU" yang sifatnya sentral, mandiri, unik, dan mempunyai kesadaran akan kesatuan batinnya. Identitas diri yang membentuk "keakuan" akan diterima dan diakui oleh orang banyak. Lebih lanjut dikatakan bahwa orang yang sedang mencari identitas adalah orang yang ingin menentukan "siapa" atau "apakah" yang diinginkan.

Identitas muncul dan ada dalam suatu interaksi yang dilakukan oleh sesama individu, sesama kelompok dan lain sebagainya. Keberadaan akan identitas seseorang akan diakui ketika seseorang melakukan interaksi dengan sesamanya. Seseorang memerlukan identitas sebagai pengakuan jati diri atas dirinya. Identitas seseorang memungkinkannya terletak pada satu posisi yang sesuai untuk menjalankan peranannya dalam masyarakat. Dalam memandang identitas, seseorang butuh atribut identitas. Atribut ini yang akan memberikan corak dan nantinya akan menjadikan seseorang mampu hidup dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan peranannya. Identitas ini bisa bentuknya secara fisik maupun nonfisik.

⁷ Di akses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30842/Chapter%20II.pdf?sequence=3> pada 24 desember 2019

Identitas diri juga merupakan komponen penting untuk menunjukkan identitas personal individu. Semakin baik seseorang memahami dirinya sendiri, maka semakin sadar dia akan keunikan dan kemiripan dengan orang lain, serta paham akan kekuatan dan kelemahan individu dalam menjalani kehidupan. Begitupun sebaliknya, hal tersebut bergantung pada sumber eksternal untuk evaluasi diri.

Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral atau gaya sosial.⁸

Penguatan identitas diri seseorang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa. Penguatan identitas diri seseorang calon yang dilakukan dengan membangun identitas diri secara massif di masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana calon perempuan mampu membangun identitas mereka dengan menojolkan kekuatan sebagai perempuan.

Pembentukan identitas diri juga memerlukan dua elemen penting, yaitu eksplorasi (krisis) dan komitmen. Istilah “eksplorasi” menunjuk pada suatu masa dimana seseorang berusaha menjelajahi berbagai alternatif tertentu dan memberikan perhatian yang besar terhadap keyakinan dan

⁸ Di akses di <http://repository.uin-suska.ac.id/5878/3/BAB%20II.pdf> pada 25 desember 2019

nilai-nilai yang diperlukan dalam pemilihan alternatif tersebut. Sedangkan “komitmen” menunjuk pada usaha membuat keputusan mengenai pekerjaan atau ideologi, serta menentukan berbagai strategi untuk merealisasikan keputusan tersebut. Berdasarkan dua elemen diatas, maka dalam pembentukan identitas diri, seorang remaja akan mengalami suatu krisis identitas untuk menuju pada suatu komitmen yang merupakan keputusan akan masa depan yang akan dijalani.⁹

Yang perlu diingat adalah bahwa tidak selalu terjadi pandangan yang sempurna antara bagaimana seseorang berpikir tentang dirinya dan bagaimana citra dirinya di mata orang lain. Identitas personal boleh jadi berbeda dari identitas sosial. Identitas personal yang di maksud adalah identitas gender. Sebagai contoh, seseorang yang dipandang oleh masyarakat sebagai laki-laki dapat saja memandang dirinya sebagai perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki.

Untuk melihat lebih jauh tentang identitas pribadi, Menurut Erikson (1959), proses identitas diri sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya (trust), otonomi diri (autonomy), rasa mampu berinisiatif (initiative), dan rasa mampu menghasilkan sesuatu (industry). Keempat komponen ini memberikan

⁹ Ibid
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30842/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

kontribusi kepada pembentukan identitas diri. Menurut Erikson, individu yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil bercirikan:¹⁰

- 1) Memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya.
- 2) Memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain.
- 3) Menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya.
- 4) Penuh percaya diri.
- 5) Tanggap terhadap berbagai situasi.
- 6) Mampu mengambil keputusan penting.
- 7) Mampu mengantisipasi tantangan masa depan.
- 8) Mengenal perannya dalam ruang publik.

Berbicara tentang identitas, merujuk pada identitas gender menjelaskan karakteristik ataupun perilaku individu yang di kaitkan dengan tugas tanggung jawab maupun peran. Identitas gender merupakan hasil konstruksi social yang membedakan kategori maskulin dan feminisme. Kategori maskulin biasanya diidentikkan dengan karakteristik aktif, dominasi, kuat, rasional, dan tenang. Sedangkan feminisme dikategorikan pasif, kelembutan, kepedulian, pengasuhan, dan kasih sayang. Identitas gender tidak hanya mengenai bagaimana seseorang memaknai dirinya, namun mencakup bagaimana nantinya seorang individu berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Lebih lanjut, identitas gender adalah perbedaan ciri, peran, kedaulatan, dan sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun

¹⁰Opcit

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30842/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

perempuan yang dikonstruksikan secara social dan budaya. Gender dapat diartikan sebagai konsep social yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antar laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antar keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dengan timbulnya gerakan social baru, identitas muncul sebagai suatu gerakan politis. Politik identitas peduli pada perbedaan-perbedaan di kalangan kelompok-kelompok orang, dan pada pemberian peluang bagian individu untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan tersebut. Politik identitas menekankan pentingnya mendengarkan suar-suara berbeda, khususnya suara kelompok-kelompok gay dan lesbian, gender, kulit hitam (Negro), dan orang cacat, dan sebagainya.¹¹

Sebagaimana telah dikemukakan, Moser dalam Mugnieszah mengemukakan adanya tiga kategori peranan gender (triple rules) yang mencakup peranan produktif, reprodktif dan pengelolaan masyarakat. Adapun pengertian masing-masing sebagai berikut:¹²

1. Peranan produktif, yaitu peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya (natura).

¹¹ Opcit. Budaya dan Identitas. Hal 122

¹² Di akses di

<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2712/BAB?sequence=7> pada 18 Juli 2019

2. Peranan reproduktif, yaitu peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak atau tugas-tugas domestic yang di butuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga.
3. Peranan pengelolaan masyarakat dan politik.

Teori ini digunakan untuk melihat kemunculan perempuan dalam politik sebagai suatu identitas. Membangun identitas diri itu kemudian dipakai untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Selain itu, pembentukan identitas dalam hal ini identitas gender dipakai untuk menerjemahkan peran, fungsi, status sebagai bentukan (konstruksi) sosial khususnya pada Hj. A. Nirma dan Hj. Martang sebagai kepala desa perempuan pertama di desanya masing-masing

2.2 Konsep kekuatan politik

Kekuatan berasal dari kata “kuat” yaitu banyak tenaga, daya, keras, usaha, dan mempunyai keunggulan yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kekuatan diartikan sebagai tingkat kesatuan yang diinginkan.¹³ Kekuatan juga diartikan sebagai penggunaan tekanan nonfisik dalam diri manusia guna mempengaruhi orang lain. Dr. Asrinaldi .M.Si mengemukakan Kekuatan politik adalah penguatan peranan politik baik individu maupun organisasi sehingga mendorong individu atau organisasi tersebut untuk membentuk kekuatan yang lebih

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

efektif guna mewujudkan kepentingan mereka Pada hakikatnya Kekuatan politik adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik hingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara luas.

Kekuatan politik pada dasarnya adalah simbol dari suatu rezim yang tengah berlangsung. Dengan kemampuan yang dimiliki pemimpin, maka ia dapat mempengaruhi atau mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat sebagai yang diperintah memiliki keterbatasan dalam bertindak berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Hal itu dapat dilakukan lewat pengenduran depolitisasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan mewujudkan desentralisasi yang nyata kepada daerah-daerah.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian kekuatan politik secara umum adalah segala kapasitas, sumber daya politik yang di gunakan aktor maupun organisasi untuk mewujudkan kepentingan mereka.mereka dipimpin dan dibimbing menuju ke arah yang diinginkan oleh orang, kelompok, atau lembaga yang memegang kekuasaan politik. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan

Bakhtiar Effendi mengemukakan bahwa kekuatan kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik.Kekuatan politik saling berinteraksi

dalam sebuah sistem politik.¹⁴ Pada dasarnya merupakan unit-unit politik yang turut membentuk struktur politik. Dalam perspektif behavioralisme, individu ditempatkan sebagai unit terkecil dalam sebuah sistem politik, terutama individu-individu yang berkedudukan sebagai pemimpin politik. Dalam sistem politik, unit-unit politik ini yang membentuk sistem politik dapat berwujud menjadi tindakan politik, yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat.¹⁵

Dalam kekuatan politik ini lebih membahas tentang aktor. Aktor adalah orang-orang yang berpengaruh dalam kegiatan politik, yang mempunyai kemampuan untuk mengatur atau memerintah dalam system politik dan kehidupan masyarakat. Aktor merupakan kelompok kecil di antara masyarakat yang mempunyai kedudukan dominan dan memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Dalam hal ini, peran aktor adalah bagaimana terlibat dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan.

Aktor biasanya dibagi menjadi dua kelas yang pertama, elit yang memerintah yang mana terdiri dari individu yang secara langsung memainkan atau mengatur peranan yang besar dalam suprastruktur politik (lembaga formal). Kedua, elit yang tidak memerintah dalam hal ini individu yang tidak berada dalam bagian suprastruktur politik. Elit yang tidak memerintah seperti tokoh agama, tokoh masyarakat.

Kekuatan politik aktor adalah kekuatan yang dia miliki yang melekat dalam dirinya, seperti kecantikan, ketampanan, karakter atau watak.

¹⁴ Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. (Jakarta : Seri Prisma, 1989)

¹⁵ Muslim Mufti, M.Si. *Kekuatan Politik di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)

Kharisma yang dimiliki aktor bisa menjadi kekuatannya untuk mempengaruhi orang dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Selain itu, latar belakang yang dimiliki si aktor juga berpengaruh terhadap karir politik yang ia jalani. Kekuatan ini kemudian yang dimunculkan actor untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari orang-orang yang di perintahnya.

Para pemikir-pemikir elit/aktor politik menyatakan bahwa, Pertama, kekuasaan dalam masyarakat terdistribusikan dengan tidak merata dan hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang disebut elit. Kedua, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu,dan memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya dan oleh karena itu elit menjadi otonom.¹⁶

Aktor hadir di tengah masyarakat untuk mempengaruhi lingkungan mereka baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka berada di posisi pembuatan keputusan yang memiliki konsekuensi yang besar. Aktor menempati posisi pimpinan strategis dari struktur social, baik itu pimpinan parpol, pimpinan eksekutif maupun keagamaan yang berasal dari kekuasaan,kekayaan,kehormatan dan sebagainya.

Linz dan Stephan (1996) menyebutkan bahwa arena politik ditandai oleh hadirnya empat aktor utama : pertama, *the state* yang dalam berbagai literatur ditempatkan sebagai public agency. Kedua, *political society*, yang di dalamnya terdapat partai politik. Ketiga, *economic*

¹⁶ Di akses di <https://sosialpolitikislam.wordpress.com/2015/04/02/elit-politik/> pada tanggal 01 juli 2019

society, yang selalu bergerak dalam logika-logika kapital dan pasar. Keempat, *civil society*, yang memiliki karakteristik keswadayaan (voluntarisme) dan mandiri dari pengaruh negara”.¹⁷

Dengan meminjam kerangka Tornquist, Linz, Stephan, dan Diamond, studi ini memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dalam dua arena utama : pertama, interaksi di arenanya masing-masing (micro politic). Kedua, interaksi antar aktor dalam arena yang lebih luas (macro politic), salah satu arena penting yang bisa digunakan untuk melihat lebih jauh keterlibatan aktor-aktor dalam arena yang lebih luas adalah kompetisi publik dan pembuatan kebijakan publik.

Dalam mengidentifikasi siapa termasuk dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yakni:¹⁸

1. Metode posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki jabatan atau posisi strategis dalam sistem politik. Aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan.
2. Metode reputasi, aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan publik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode pengaruh/keputusan, aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini

¹⁷ Di akses di <http://digilib.unila.ac.id/2171/9/BAB%20II.pdf> pada tanggal 01 juli 2019

¹⁸ Nasir, Rahmi. Aktor Politik sebagai salah satu kekuatan politik. *www.academi.edu.hal* 2

memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki. Sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Prof Jeffrey A Winters, pakar Ilmu Politik dari Northwestern University Amerika Serikat menyebut bahwa kekuatan politik dipengaruhi oleh:¹⁹

1. Ekonomi (*Financial*)

Kekuatan ekonomi atau kekayaan biasanya menjadi factor penentu dalam pembentukan kekuatan ekonomi mencakup harta benda kepemilikan actor seperti uang, emas, tanah, mesin dan benda-benda lainnya yang mempunyai harga jual. Selain menggunakan dana pribadi, calon juga biasa bekerja sama dengan pengusaha /pebisnis Kekuatan ekonomi yang lebih tampak biasanya uang. Uang biasanya digunakan untuk membiayai pada proses kampanye. Masing-masing actor berusaha meyakinkan masyarakat dengan melalui kampanye bahwa mereka yang memahami persoalan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saluran kampanye bisa melalui spanduk, televisi, radio, surat kabar, baliho dan juga tim sukses.

2. Jabatan

¹⁹ ANDI AGUSTYARA MARTI.2015.kekuatan politik perempuan pada pemilihan kepala desa (Studi Kasus : Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Periode 2012-2018)hal.2327

Kekuatan politik juga dipengaruhi oleh jabatan selain kekuatan finansial. Jabatan dapat mempengaruhi atau membentuk citra politik seseorang sehingga bisa mengkonstruksi pilihan masyarakat dan persepsi masyarakat. Seorang yang memiliki jabatan bisa saja memanfaatkan jabatan dan kepopulerannya untuk mendapatkan kekuasaan dan hal ini menjadi kekuatan politiknya. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan. Oleh karena itu jabatan yang dimiliki seseorang menjadi kekuatan politiknya untuk mendapatkan kekuasaan.

3. Popularitas

Kekuatan politik yang dibentuk karena popularitas adalah hal yang paling baik. Popularitas yang diciptakan dari citra-citra politik akan bisa mengkonstruksi masyarakat untuk mendukung ataupun tidak mendukung seseorang. Popularitas dalam hal ini seperti keturunan (ikatan keluarga), jabatan, pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui. Seorang pemimpin yang memiliki popularitas biasanya karena memiliki suatu hal yang berasal dari dalam dirinya yaitu kharisma. Popularitas jika disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan charisma dan wibawa akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa.²⁰

4. Kekuatan mobilisasi

²⁰ *Ibid.* hal 29

Mobilisasi politik adalah hal yang biasa terjadi pada system politik apapun. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan massa, baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan tuntutan mendesak sebuah kelompok politik (partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi tidak mengindahkan besaran ruang pengambilan keputusan, kehadiran partisipan, dan juga kontrol atas keputusan politik yang ada. Dalam hal ini, kandidat yang pandai dalam menggerakkan suara massa sehingga beralih kepada dirinya akan memperoleh kekuasaan.²¹

5. Kekuatan Keluarga

Keluarga dalam pengertian antropologi adalah suatu jenis kelompok kekerabatan, istilah lainnya sering disebut kelompok persaudaraan, kolektivitas dan komunalisme. Suatu suasana social dimana semua kelompok merasa dalam suatu hubungan kekeluargaan. Posisi keluarga sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik seseorang. Posisi politik seseorang atau kelompok tertentu ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Keluarga memiliki peran melahirkan seorang pemimpin politik dengan berbagai macam bentuk dukungan baik dalam bentuk dana maupun moril psikologis.²²

²¹ *Ibid.* hal 30-31

²² Dewi Anggarani. 2013. Politik kekerabatan (jurnal Politik Profetik). Vol 2 no. 2 hal.5

Konsep ini hadir untuk melihat proses kemunculan dan keterpilihan Hj. A. Nirma dan Hj. Martang sebagai kepala desa Watu TOA dan Bara'e. keterpilihan mereka itu tidak terlepas dari kekuatan politik yang beliau miliki. Sebab kekuatan politik itu dipakai untuk memperoleh dan mendapatkan kekuasaan. Sehingga teori ini dipandang perlu untuk digunakan dalam penelitian ini.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Secara umum identitas dapat diartikan sebagai refleksi diri dari seseorang yang menjadi pembeda antar gender, seks, kelompok etnis, suku, budaya, agama. Identitas secara umum di bedakan menjadi identitas social dan identitas pribadi. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang identitas pribadi yaitu identitas sebagai perempuan dalam penempatannya sebagai kepala desa.

Identitas sebagai perempuan itu kemudian dijadikan sebagai kekuatan politik. Kekuatan politik yang di maksud penulis adalah kepribadian yang dimiliki seorang perempuan. Keperbadian itu berupa kelembutan, kepedulian, pengasuhan, dan kasih sayang. Kekuatan politik ini merupakan modal penting bagi seseorang guna memperoleh dan mempertahankan kemenangan mutlak yang berada di ranah politik, baik skala secara nasional maupun tingkat paling kecil terkhusus di pilkades desa di desa Watu Toa dan desa Bara'e, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Penulis melihat bahwa keterpilihan kedua perempuan tersebut memiliki sumber daya yang di gunakan sebagai kekuatan penunjang dalam keterpilihan mereka sebagai kepala desa. Sumber daya yang di maksud seperti jaringan keluarga, jabatan, popularitas, maupun ekonomi serta mobilisasi. Sumber daya tersebut digunakan sebagai kekuatan politik dalam pemilihan kepala desa periode 2018-2024.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggambarkan bagaimana identitas diri sebagai perempuan itu menjadi kekuatan politik dalam pemilihan kepala desa tersebut. Identitas diri dan sumber daya lainnya dimanfaatkan oleh kepala desa Watu Toa dan Bara'e sehingga bisa menang dalam pertarungan politik menjadi kepala desa masing-masing.

Mengingat bahwa kedua kepala desa tersebut adalah seorang perempuan yang berhasil mengalahkan para calon yang lain sekalipun itu laki-laki. Selain itu fenomena tersebut juga merupakan sesuatu yang menarik, pasalnya berada di tengah budaya patriarki yang sudah lama di kabupaten Soppeng. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti kekuatan identitas perempuan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Dengan menggunakan menggunakan teori identitas yang lebih mengarah pada identitas pribadi dan konsep kekuatan politik yang mendukung topik pembahasan, yang dituangkan dala skema pikir di bawah ini.

2.4 SKEMA PIKIR

